

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan lapor ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak serta apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. Metode penulisan yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini yaitu menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan browsing internet. Hasil penelitian berdasarkan pengamatan langsung oleh penulis di KPP Pratama Jambi Telanaipura di peroleh bahwa, Seluruh Wajib Pajak orang pribadi dan badan harus memenuhi persyaratan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk memberikan alasan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Surat keterangan ini merupakan surat keterangan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia (bagi orang pribadi), sudah menikah (bagi perempuan yang sudah menikah), atau perusahaannya mengalami kebangkrutan dan dibubarkan (bagi badan usaha). Permohonan penghapusan NPWP hanya dikabulkan apabila pajak telah dibayar atau hak tagih telah habis masa daluwarsa. Hal ini berlaku untuk semua Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan. Penghapusan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi sering dilakukan karena wajib pajak tersebut meninggal dunia pada tahun tertentu, wanita tersebut menikah, atau penghasilannya tidak melebihi penghasilan bebas pajak (PTKP). Namun bagi wajib pajak badan, NPWP tidak berlaku lagi karena banyak perusahaan yang bangkrut sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bubar dan berhenti beroperasi. Salah satu kendala pencabutan NPWP adalah wajib pajak tidak memahami persyaratan pencabutan NPWP.

Kata Kunci: NPWP, Pajak, Penghapusan, Wajib Pajak.

ABSTRACT

The purpose of writing this report is to find out the procedure for deleting a Taxpayer Identification Number and what conditions must be met to delete a Taxpayer Identification Number at the Jambi Telanaipura Primary Tax Service Office. The writing method used in this final assignment report is using literature study methods, interviews, and internet browsing. The results of research based on direct observations by the author at KPP Pratama Jambi Telanaipura showed that all individual and corporate taxpayers must fulfill the requirements for deleting their Taxpayer Identification Number (NPWP), including providing reasons for deleting their Taxpayer Identification Number (NPWP). This certificate is a certificate that the taxpayer has died (for individuals), is married (for married women), or the company has gone bankrupt and been dissolved (for business entities). Requests to delete NPWP are only granted if the tax has been paid or the right to collect has expired. This applies to all Taxpayers, both Individuals and Entities. Removal of NPWP for individual taxpayers is often done because the taxpayer died in a certain year, the woman married, or her income did not exceed tax-free income (PTKP). However, for corporate taxpayers, NPWP is no longer valid because many companies went bankrupt so these companies dissolved and stopped operating. One of the obstacles to revoking NPWP is that taxpayers do not understand the requirements for revoking NPWP.

Keywords: *NPWP, Tax, Taxpayer, Write-off.*